

Analisis Sikap Pemerintah Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

Elian Manda Prasetyo¹

Septyanto Galan Prakoso, S.I.P., M.Sc.²

Abstract

The policy of the Japanese government under the leadership of Shinzo Abe the second period (2012-2015) to the Senkaku Islands dispute involving Japan's bilateral relations with China a main topic in this study. This research uses a qualitative approach with literature study and interview as the technique of the data collection. Data analysis draws on qualitative analysis consisted of multiple steps such as data collection, data reduction, data displays, and conclusion drawing. The conceptual framework of this research departs from the analysis of policy's formulation and implementation, national interest, Regional Security Complex theory, and the concepts of the Japanese minds.

The results showed that Prime Minister Shinzo Abe as the incumbent at this time dared to take controversial policy. The assessment does not only come from within the country, but the world spotlight also provides the same assessment of the Abe's attitude. It is not independent of how Abe respond to the issue of disputed Senkaku Islands. Abe preferring to issue new policies compared to continue what has already been established. Some of the successful Abe's decision to a policy that has been implemented, but much still do not become permanent policy because there is opposition from various parties. In keeping with its relationship with China, Abe still has the Japanese tradition of thought called hedataru to najimu, where Abe appreciated because of the distance between Japan and China should be maintained. His attitude thus make our bilateral relationship could interwoven despite the tension created by the disputes often experience ups and downs.

Keywords: Policy Analysis, Senkaku Islands Dispute, National Interest, Hedataru to Najimu

¹ Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

²Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

A. Pendahuluan

Jepang adalah salah satu negara kepulauan di dunia, meskipun telah memiliki banyak pulau akan tetapi tidak menjadikan Jepang berhenti untuk berusaha mempertahankan wilayah nya jika menghadapi sengketa dengan negara lain yang mempunyai kepentingan yang sama. Salah satu masalah persengketaan yang telah dialami Jepang yakni terkait dengan status kepemilikan Kepulauan Senkaku yang diperebutkan Jepang dengan Tiongkok. Kepulauan Senkaku adalah nama dalam bahasa Jepang, sedangkan Tiongkok menyebutnya dengan Kepulauan Diaoyu. Kepulauan Senkaku terletak di 150km dari Pulau Yaeyama di Jepang dan 170km Timur laut dari Taiwan. Kepulauan Senkaku terdiri dari sebuah pulau yang bernama Ootsuri Jima dan empat pulau yang berukuran lebih kecil lainnya yaitu Kuba Jima, Taisho Jima, Minami Kojima, dan Kita Kojima. Semua pulau tersebut tidak berpenghuni dan terdiri dari tiga batuan karang yang bernama Okino Kitaiwa, Okino Minami-iwa, dan Tobise.¹ Meskipun pulau ini terhitung berukuran kecil akan tetapi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh pulau ini terhitung melimpah, sehingga diperebutkan oleh negara-negara sekitarnya.

Awal mula Jepang mengklaim Kepulauan Senkaku sebagai daerah teritorial nya adalah ketika tahun 1895 dengan menggunakan hukum yang ada saat itu. Jepang mengamati kepulauan tersebut, lalu terbukti bahwa kepulauan ini sedang tidak dibawah kuasa siapapun, baik Dinasti Qing yaitu dinasti berkuasa dari Tiongkok maupun negara manapun. Kemudian, dengan adanya Keputusan

¹ Yuki Tatsumi, "Senkaku Islands/ East China Sea Disputes - A Japanese Perspectives."

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

Kabinet pada 14 Januari 1895² maka ditetapkan bahwa Pulau Senkaku menjadi bagian dari wilayah negara Jepang dan berada di bawah administrasi prefektur Okinawa. Setelah itu pada Mei tahun 1920 Tiongkok mengirim Surat Apresiasi yang berisi bahwa Tiongkok mengakui Kepulauan Senkaku menjadi bagian dari Okinawa di Jepang.³

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dibuatlah suatu perjanjian yaitu Perjanjian San Fransisco. Perjanjian ini berisikan penentuan wilayah Jepang oleh Amerika Serikat. Menurut perjanjian ini, Kepulauan Senkaku tidak menjadi wilayah seperti apa yang sudah Jepang tetapkan, akan tetapi pulau ini hanya dibawah wilayah administratif Pulau Nanse di Jepang. Saat itu Tiongkok masih belum melayangkan klaim apapun. Dalam perkembangannya, pada tahun 1972 muncullah *Okinawa Reversion Agreement* yang didalamnya lebih menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku sudah menjadi wilayah administratif Jepang dan masuk dalam wilayah teritorial Jepang menurut hukum internasional⁴, setelah itu pemerintah Jepang lebih memperhatikan kegiatan apa saja yang ada di Kepulauan Senkaku dan menempatkan petugas keamanan di wilayah tersebut.

Pada tahun 1968 dilakukan penelitian oleh *Economic Comission for Asia and the Far East* (ECAFE) yang menyatakan bahwa ada potensi besar cadangan minyak di Laut Tiongkok Selatan. ECAFE menetapkan bahwa ada seluas 200.000km⁵ daerah yang memiliki potensi minyak dan gas terbanyak di dunia dan

² Ministry of Foreign Affairs Japan, “*The Senkaku Islands: Seeking Maritime Peace based of the Rule of Law, not force or coercion*”

³ Ministry of Foreign Affairs Japan, *ibid.*

⁴ Ministry of Foreign Affairs Japan, *ibid.*

⁵ Ministry of Foreign Affairs Japan, *ibid.*

kemungkinan terbesar nya daerah ini berada di antara landasan kontinental Taiwan dengan Jepang. Peta yang dirilis dengan jelas menunjukkan pada pulau yang dimaksudkan tersebut adalah Kepulauan Senkaku, setelah itu muncullah klaim kedaulatan kepulauan ini, yang salah satunya berasal dari Tiongkok.

Sebelum adanya penemuan sumber daya yang melimpah, Tiongkok tidak pernah melakukan klaim apapun terhadap Pulau Senkaku, Tiongkok juga tidak menetapkan kepulauan ini sebagai daerah teritorialnya secara resmi pada peta nasionalnya. Terdapat dua perbandingan peta nasional Tiongkok yaitu *The Republic China New Atlas* yang dipublikasikan 1933 dan *World Atlas* yang dipublikasikan tahun 1958 di Tiongkok.⁶ Di kedua peta yang dipublikasikan secara resmi tersebut, kepulauan ini tidak termasuk dalam wilayah administrasi Tiongkok. Peta tersebut juga mencantumkan dengan jelas bahwa nama kepulauan tersebut adalah Kepulauan Senkaku dan bukan Kepulauan Diaoyu yang berarti Tiongkok mengakui kepulauan ini sebagai milik Jepang.

B. Sikap Pemerintah Jepang

Pentingnya mempertahankan Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari mempertahankan kepentingan nasional negara Jepang. Setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing sesuai dengan kemampuan ekonomi, geografis, militer, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Guna mencapai kepentingan nasional, maka dikeluarkanlah kebijakan sebagai implementasinya.⁷ Setelah adanya klaim yang datang dari Tiongkok, Jepang menetapkan Kepulauan Senkaku menjadi kepentingan nasionalnya. Adanya klaim dari Tiongkok pun

⁶ Yuki Tatsumi, *loc.cit.*

⁷ Mas'oeed, Mochtar, *ibid.*

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

disusul dengan usaha Tiongkok dalam menguasai perairan sekitar Kepulauan Senkaku yang memicu kemarahan dari pihak Jepang. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan Kepulauan Senkaku sebagai kepentingan nasional bagi Jepang :

1. Berdasarkan data yang dihimpun dari penelitian yang dilakukan *United Nations Commission and Economic for Asia and the Far East (ECAFE)*, ditemukan sumber minyak bumi dan gas alam terbanyak di dunia yang berarti bahwa sumber ini bisa digunakan Jepang untuk mengurangi pengeluaran negara demi memasok gas alam dan minyak bumi yang diimpor dari Timur Tengah.⁸
2. Berkaitan dengan sejarah ditetapkannya Kepulauan Senkaku sebagai wilayah Jepang. Sebelum adanya penelitian yang dilakukan ECAFE tersebut tidak ada klaim yang datang dari negara manapun termasuk Tiongkok. Terlihat bahwa Jepang tidak semata-mata mengklaim kepulauan tersebut tanpa adanya data yang mendukung, dalam hal ini ditetapkannya Kepulauan Senkaku sebagai wilayah teritorial Jepang juga berdasarkan penelitian kepemilikan yang telah dilakukan pada akhir abad ke-19.⁹

Guna mempertahankan kepentingannya tersebut Jepang berusaha agar Kepulauan Senkaku tidak berhasil dikuasai oleh Tiongkok sehingga sumber daya alam yang ada dikuasai penuh oleh Jepang. Selanjutnya pemerintah Jepang mengusahakan berbagai cara untuk mempertahankan Kepulauan Senkaku sebagai wilayah teritorial Jepang termasuk di dalamnya adalah mengeluarkan sikap tegas terhadap Tiongkok. Sejak kekalahan Jepang pada Perang Dunia II,

⁸ Ministry of Foreign Affairs Japan, *op.cit.*

⁹ Ministry of Foreign Affairs Japan, *op.cit.*

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

Jepang harus menerima beberapa sanksi yang diberikan Amerika Serikat termasuk di dalamnya yang membatasi Jepang dalam mengembangkan militernya dimana Jepang hanya diperbolehkan memiliki *Self-Defense Force* (SDF). Batasan-batasan yang diatur oleh Amerika Serikat terkandung dalam pasal 9 Konstitusi Jepang, sehingga pemerintah Jepang tidak bisa memaksimalkan kinerja pertahanan yang dimiliki Jepang baik secara sumber daya manusia maupun peralatan perang yang dimiliki Jepang. Hal yang disebabkan oleh adanya pasal 9 Konstitusi Jepang tersebut adalah kurangnya pemaksimalan kinerja pertahanan Jepang yaitu terbatasnya ruang gerak militer Jepang sehingga keamanan nasional Jepang rentan oleh campur tangan negara lain. Tidak hanya urusan keamanan dengan negara lain saja namun juga keamanan dalam negeri.

Pemerintah Jepang sadar akan bahaya yang dimiliki Jepang terkait dengan keamanan nasional yang mengancam keutuhan bangsa. Adanya ancaman dari negara lain seperti Tiongkok dan Korea Utara mengharuskan Jepang untuk sigap dengan pasukan militernya. Langkah pemerintah Jepang adalah merombak *National Defense Program Guidelines* (NDPG) yang dikeluarkan pada 17 Desember 2010 yang lebih dikenal dengan NDPG 2010.¹⁰ NDPG sendiri sebelumnya hanya berfokus pada pertahanan militer dalam negeri saja, tetapi karena kesadaran pemerintah Jepang atas ancaman yang datang dari luar maka pada tahun 2010, NDPG dirombak. Perombakan yang dilakukan ini tidak hanya untuk merespon kegiatan nuklir Korea Utara yang meresahkan akan tetapi kegiatan Tiongkok di

¹⁰ Adam P. Loff, *Eastwestcenter.org*, "Japan's 2010 National Defense Program Guidelines- Reading The Tea leaves".

Laut Tiongkok Selatan khususnya di perairan Kepulauan Senkaku. Dalam NDPG 2010 terdapat perombakan tatanan SDF.¹¹

C. Sikap Shinzo Abe

Perdana Menteri Shinzo Abe sejak 2012 menjabat untuk kedua kalinya setelah pada periode pertama yaitu tahun 2007 hingga 2008 mengundurkan diri karena masalah kesehatan dan adanya skandal korupsi pada kabinetnya. Pada periode yang kedua ini, Shinzo Abe memfokuskan kebijakan luar negerinya terhadap keamanan nasional. Melihat keberhasilan Tiongkok yang meroket menjadi kekuatan utama di Asia Timur baik pada bidang ekonomi dan militer menjadikan Perdana Menteri Shinzo Abe memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk dapat bersaing dengan Tiongkok agar menjadi kekuatan yang seimbang di kawasan Asia Timur dan jika memungkinkan melebihi Tiongkok. Selain itu Abe menganggap sengketa Kepulauan Senkaku membutuhkan perhatian khusus yang disikapi nya dengan memaksimalkan pertahanan militer Jepang.

Shinzo Abe dikenal dengan pribadi yang berjiwa nasionalisme tinggi dan Shinzo Abe dikenal dengan kebijakannya yang *'hawkish'*. Sikap semasa pemerintahannya dianggap berani dan kontroversial. Sikap dan gaya kepemimpinan Shinzo Abe dalam masa periode kedua ini bukan tanpa alasan. Pemikirannya sedikit banyak dipengaruhi oleh latar belakangnya. Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, meskipun terlahir di Tokyo akan tetapi Shinzo Abe membangun karir politik nya di Yamaguchi yang terletak di sebelah barat Pulau Honshu. Shinzo Abe memperoleh dukungan mayoritas dari daerah ini semasa pencalonan menjadi Perdana Menteri. Yamaguchi sendiri dahulu disebut

¹¹ A. Berkofsky, "Japan's Defense and Security Policies : What's Old, What's New, What's Ahead"

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

dengan Choshu yang merupakan salah satu dari empat daerah yang berhasil menggulingkan shogun Tokugawa yang memerintah Jepang selama 250 tahun.¹² Masyarakat Choshu mencoba mengembalikan Jepang yang terisolasi terhadap masyarakat luar saat itu akibat keshogunan yang sedang berkuasa. Setelah berhasil digulingkan, Jepang menjadi negara yang lebih terbuka terhadap dunia luar dan mulai mengembangkan industrialisasi dalam negerinya.¹³ Shinzo Abe disebut-sebut terpengaruh dengan pemikiran dan tradisi masyarakat Choshu yang mencintai negerinya secara utuh dan menganggap Jepang sendiri menjadi kepentingan nasional yang harus dijaga.

Gagasan-gagasan yang dikeluarkan Abe merupakan inspirasi dari tokoh idolanya yang tidak lain adalah kakeknya sendiri. Dalam sebuah buku biografi yang ditulisnya pada bulan Juli tahun 2006 berjudul “*Toward a Beautiful Country*”¹⁴, Shinzo Abe menyebutkan bahwa idolanya adalah kakeknya sendiri yaitu Nobusuke Kishi. Dikisahkan Kishi merupakan penjahat perang yang sempat menjadi tawanan oleh Amerika Serikat. Setelah keluar dari penjara, Kishi menapaki karirnya sebagai politikus. Sempat bergabung dengan partai milik Yoshida Shigeru yang sempat menjadi Perdana Menteri Jepang, Kishi memutuskan untuk keluar karena adanya konflik *intern* yang terjadi. Setelah itu Kishi memutuskan untuk bergabung dengan partai milik lawan Yoshida Shigeru yaitu Hatoyama Ichiro dan sempat ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal dalam partai.¹⁵ Kishi merupakan pembentuk sistem politik Jepang pasca perang dimana

¹² Bert Edström, “The Success of Successor : Abe Shinzo and Japan’s Foreign Policy”, hlm.19

¹³ Bert Edström, *ibid*, hlm.19

¹⁴ Bert Edström, *loc.cit*, hlm.21

¹⁵ Bert Edström, *ibid*, hlm.21

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

dia menjadi pemimpin yang mendeklarasikan dirinya sebagai anti komunisme dan menuntut adanya revisi terhadap konstitusi Jepang pada masa itu. Setelah itu Kishi mendirikan *Liberal Democratic Party (LDP)* tahun 1955 yang secara singkat menjadi partai utama di Jepang.

Kishi kemudian menjadi Perdana Menteri karena menggantikan Perdana Menteri terdahulu yaitu Ishibashi Tanzan yang turun dari jabatannya karena masalah kesehatan. Semasa kepemimpinannya, Kishi dikenal dengan pribadi yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi sehingga dikagumi banyak orang akan tetapi Kishi juga merupakan pemimpin yang kontroversial ditambah dengan adanya latar belakang saat menjadi penjahat perang yang tidak dapat dihilangkan dari dirinya. Beberapa penulis biografi tentang dirinya menilai bahwa Kishi merupakan pribadi yang cakap dalam segala hal serta tidak ragu menggunakan ancaman atau paksaan dalam meraih tujuannya.¹⁶

Salah satu usaha Kishi yang saat kontroversial adalah di saat kepemimpinan Perdana Menteri Yoshida Shigeru. Saat itu PM Shigeru memutuskan untuk menandatangani sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat yang menurut Kishi isi perjanjian tersebut berisi ketimpangan bagi Jepang. Kishi merupakan pribadi yang menginginkan Jepang bisa terlepas dari rasa malu akibat kekalahan yang dideritanya di masa depan nanti. Akhirnya Kishi dapat meyakinkan pihak Amerika Serikat untuk dapat merevisi perjanjian tersebut akan tetapi jalan menuju ratifikasi perjanjian tersebut tidaklah mudah. Kishi ditolak oleh sebagian besar anggota majelis serta masyarakat Jepang sendiri dengan melakukan demonstrasi yang terhitung besar di saat itu. Di dalam buku tersebut, Abe

¹⁶ Bert Edström, *ibid*, hlm.21

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

menceritakan bahwa saat itu ada begitu banyak orang yang berkumpul di depan rumah nya dengan meneriakkan “*Down with Ampo*” dimana Ampo adalah singkatan dari revisi perjanjian keamanan yang menjadi sumber masalah tersebut, kemudian Abe menirukan kata-kata itu lalu Kishi tertawa dan mengoreksi kata-kata Abe kecil yang seharusnya “*Yes with Ampo*”.¹⁷

Shinzo Abe terkesan dengan kepribadian kakeknya yang sangat memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Jiwa nasionalisme tinggi yang dibanggakan Abe adalah saat Kishi dengan tanpa ketakutan memperjuangkan hak warga Jepang dengan menuntut revisi perjanjian tentang keamanan dengan Amerika Serikat yang dinilai tidak adil sehingga Jepang dapat menjadi negara yang lebih baik dan lepas dari cap akibat kekalahan perang. Serupa dengan apa yang dilakukan Kishi, Abe juga melakukan usaha revisi terhadap pasal 9 Konstitusi Jepang yang akan dijelaskan kemudian. Pengalaman masa lalu dan inspirasi dari kakeknya, Abe terbentuk menjadi pribadi yang dikenal masyarakat Jepang saat ini.

Berdasarkan pengalaman dan inspirasi masa lalu nya tersebut, Shinzo Abe dikenal dengan pribadi yang saat ini ditunjukkannya melalui sikap-sikap yang ia keluarkan terhadap Jepang. Shinzo Abe dikenal dengan kebijakannya yang konsisten, sejak diresmikan pada Desember 2012 menjadi Perdana Menteri, Shinzo Abe bertekad untuk mendukung adanya perdamaian di bumi. Tahun pertama kepemimpinannya, Shinzo Abe membahas bagaimana nantinya dia akan menjalin hubungan dengan Tiongkok. Shinzo Abe menganggap bahwa hubungan antara Tiongkok dan Jepang menjadi hubungan yang paling penting. Shinzo Abe berkomitmen hubungan ini adalah hubungan yang saling menguntungkan antara

¹⁷ Bert Edström, *ibid*, hlm.21

kedua pihak berdasarkan kepentingan strategi yang sama dengan Tiongkok dan Abe akan selalu membuka pintu untuk berdiskusi dengan pemimpin Tiongkok. Semenjak sengketa Kepulauan Senkaku mulai memanas, hubungan kedua negara ini pun juga tidak baik. Guna menghadapi klaim Tiongkok atas Kepulauan Senkaku di periode kedua Abe menjabat ia melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi klaim tersebut.

Selama masa jabatan periode yang kedua, Abe memilih fokus dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Abe melihat bahwa ancaman dari luar merupakan hal serius yang harus segera ditindaklanjuti. Shinzo Abe melihat pembatasan ruang gerak militer oleh pasal 9 Konstitusi Jepang harus segera diubah, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengamandemen pasal tersebut. Meskipun NDPG telah dirombak sedemikian rupa pada tahun 2010 akan tetapi Shinzo Abe merasa kinerja militer Jepang untuk melindungi keamanan nasional belum dilakukan secara maksimal. Namun, untuk mengamandemen pasal 9 tidak mudah karena kurangnya dukungan politik dan dukungan publik.

Guna mewujudkan keinginan Shinzo Abe untuk mengamandemen pasal tersebut dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan baik di parlemen maupun masyarakat Jepang. Namun, kedua dukungan yang seharusnya didapatkan Shinzo Abe tidak terwujud. Dalam parlemen harus didapatkan 2/3 suara sehingga kebijakan dapat terwujud. Sedangkan menurut koran liberal Jepang, *Asahi Shimbun*, Abe hanya dapat mengumpulkan 49% suara.¹⁸ Jika pemungutan suara dilakukan dalam *Liberal Democratic Party (LDP)*, hasil suara

¹⁸ J. Berkshire Miller, "Abe's Difficult Road to Constitutional Change in Japan."

tetap tidak menunjukkan kabar baik bagi Abe. Menurut *Mainichi Shimbun*, hanya 42% yang mendukung adanya amandemen sedangkan sisanya menolak.¹⁹ Hasil yang sama didapatkan pula dari dukungan publik yang tidak setuju atas dilakukannya amandemen pasal 9 tersebut.

Gagalnya Shinzo Abe untuk mendapatkan dukungan suara menunjukkan jika keputusan untuk mengamandemen pasal 9 Konstitusi Jepang bisa dikaitkan dengan pola masyarakat Jepang yang bersifat pasifis²⁰ dan sebagian besar masih memiliki trauma mendalam semenjak kekalahan Jepang pada Perang Dunia II sehingga masyarakat Jepang tidak ingin mengambil resiko dalam membuat kebijakan dengan merubah apa yang telah ditetapkan Amerika Serikat untuk pertahanan militer Jepang. Hal ini didukung oleh pendapat warga Jepang yaitu Prof. Naoko, bahwa ia berpendapat adanya amandemen yang diinginkan Shinzo Abe kurang dikaji tentang bagaimana dan apa yang akan di amandemen oleh Abe sendiri.

Di samping sikapnya dalam mengamandemen pasal 9 Konstitusi Jepang, Shinzo Abe juga membuat kebijakan yang tidak terduga pada tahun 2013 yaitu menaikkan anggaran militer. Terhitung sejak tahun 2002, anggaran militer Jepang mulai mengalami penurunan hingga 2012.²¹ Mengingat kondisi perekonomian Jepang yang belum baik dapat dikatakan bahwa langkah Abe sangat berani, karena selama 11 tahun sebelumnya belum ada Perdana Menteri yang berani

¹⁹ J. Berkshire Miller, *ibid.*

²⁰ Sebagian masyarakat Jepang masih bersifat pasifisme, yaitu dimana pasifisme merupakan paham penolakan terhadap perang dan kekerasan apapun dalam menyelesaikan konflik. Pasifisme mengandung pemahaman bahwa adanya perang yang diprakarsai sebuah negara dan partisipasi individu dalam perang merupakan hal yang salah dalam situasi apapun

²¹ Isabel Reynolds, *bloomberg.com*, "Japan Defense Budget to Increase for First Time in 11 Years."

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

untuk mengambil langkah ini. Tentu saja Abe masih mentaati kenaikan anggaran tersebut yaitu tidak boleh lebih dari 1% dari total GDP Jepang. Pada tahun 2013 anggaran militer Jepang naik sebesar 0,8% dari anggaran tahun 2003.²² Kenaikan anggaran ini dimaksudkan untuk memperkuat pesawat mata-mata dan menambah personel militer. Sejak Abe menjabat pada periode nya yang kedua ini, anggaran militer terus ditingkatkan karena tensi antara Jepang dan Tiongkok yang mulai kuat serta langkah-langkah Tiongkok yang terus memprovokasi Jepang terutama di daerah perairan Kepulauan Senkaku.

Selain melakukan perubahan dalam postur SDF, di era kepemimpinannya Abe membentuk sebuah badan intelijen yang diberi nama *National Security Council* (NSC). Badan ini diresmikan pada 13 Desember 2013.²³ Abe memilih penasihatnya di bidang urusan luar negeri bernama Shotaro Yachi sebagai kepala. NSC berangotakan 60 orang yang berasal dari Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Pertahanan.²⁴ Sebenarnya badan serupa telah ada terlebih dahulu, yaitu bernama *Cabinet Intelligence and Research Ofiice* akan tetapi terlalu banyak perombakan di dalam yang harus dilakukan maka diputuskan untuk membentuk badan yang baru. Postur kinerja NSC dibuat lebih sederhana sehingga informasi dapat langsung disampaikan kepada Perdana Menteri sehingga kontrol keamanan dapat dilakukan dengan efektif. Tujuan dibentuknya badan ini tidak lain adalah memperkuat hubungan Jepang dengan kawannya yaitu Amerika Serikat dan mengefektifkan pencapaian informasi di lapangan kepada pusat.

²² Kirk Spitzer, *nation.time.com*, "Japan Boosts Defense Spending, More or Less"

²³ Ministry of Foreign Affairs Japan, *mofa.go.jp*, "Nationa Security Council (NSC)"

²⁴ News.xinhuanet.com, "Japan launches US-style National Security Council"

D. Dampak Terhadap Keamanan Regional dan Hubungan Bilateral

Asia Timur yang meliputi Tiongkok, Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan merupakan kawasan yang memiliki kompleksitas yang tinggi dikarenakan adanya dua kekuatan, dengan kata lain kawasan ini merupakan unipolar yaitu Tiongkok dan Jepang yang dinilai sama kuat. Untuk memahami pola hubungan yang ada lebih mudah jika dilihat hubungan antar dua negara. seperti yang dikemukakan oleh Barry Buzan, adanya ketergantungan dalam kawasan ini sendiri adalah dimana Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan bekerja sama karena memiliki kekhawatiran yang sama akan adanya senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara. Korea Utara merupakan salah satu negara di Asia Timur yang tetap bersikukuh dalam pengembangan senjata nuklirnya meskipun telah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Ketergantungan keamanan yang diungkapkan dalam RSC bisa dilihat dalam kasus ini dimana negara sekawasan seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan mengadakan pertemuan untuk bersama melawan Korea Utara.

Adanya ketergantungan terhadap kekhawatiran keamanan yang sama terlebih tidak lantas membuat hubungan ketiga negara tersebut harmonis. Meskipun keamanan yang menjadi fokus bersama tetap berlangsung namun adanya perselisihan antar negara masih ada. Kompleksitas kawasan Asia Timur selain lebih mudah jika dianalisis secara bilateral yaitu bagaimana pola hubungan yang terjalin. Tiongkok dan Jepang memiliki pola hubungan yang buruk (*enmity*) yang disebabkan karena adanya sengketa Kepulauan Senkaku yang menjadikan kedua negara saling bersaing dalam membangun pangkalan militer. Sedangkan hubungan Korea Selatan dan Jepang lebih mempunyai kompleksitas yang tinggi

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

karena kedua negara ini memiliki kedua pola hubungan yaitu baik (*amity*) dimana kedua negara ini merupakan aliansi Amerika Serikat. Namun, kedua negara ini tetap memiliki pola hubungan yang buruk (*enmity*) yang disebabkan karena adanya masalah sengketa juga yaitu adanya sengketa Pulau Dokdo.

Kompleksitas dari keamanan regional di Asia Timur menjadi bertambah dengan adanya konflik Kepulauan Senkaku. Penyebab kompleksitas selain adanya pola hubungan yang buruk dan distribusi kekuasaan yang tidak baik adalah faktor ideologi, rumitnya sejarah yang saling berkaitan, dan sengketa terhadap kepentingan nasional yang sama. Kerumitan ini tidak saja menyangkut Kepulauan Senkaku akan tetapi Pulau Dokdo yang diperebutkan oleh Korea Selatan dan Jepang. Hal yang membedakan antara kedua sengketa teritorial tersebut adalah dimana Kepulauan Senkaku diperebutkan oleh negara yang terhitung mempunyai kekuatan seimbang. Diperkuat dengan wawancara yang telah dilakukan secara email oleh penulis oleh Profesor Bhubhendar yang menyatakan bahwa Jepang dan Tiongkok adalah kunci keamanan di Asia Timur itu sendiri. Namun yang menjadi perhatian Prof. Bhubhendar adalah bagaimana Jepang dan Tiongkok tetap menyesuaikan kebijakan dari masing-masing negara lawan untuk menghindari meningkatnya tensi yang memanas dari kedua negara.

Guna menyelesaikan masalah isu keamanan yang semakin kompleks ini negara-negara Asia Timur perlu melakukan beberapa hal yang bisa menciptakan pengaturan kawasan seperti keempat model yang telah dijelaskan di atas, yaitu²⁵:

²⁵ Chen Jimin, *diplomat.com*, "Solving The Northeast Asia Security Dilemma"

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

1. Negara di Asia Timur adalah negara yang terkena korban dampak Perang Dingin yang memisahkan mereka menjadi ideologi-ideologi sesuai aliansi yang dibentuk saat itu. Maka dari itu untuk menciptakan keamanan yang ada, negara-negara di Asia Timur perlu melupakan sejarah yang telah ada dan fokus atas masa sekarang dan masa depan dengan kata lain melupakan ego masing-masing.
2. Salah satu kunci menjaga keamanan di kawasan Asia Timur adalah menjaga hubungan baik antara Jepang dan Amerika. Hal ini disebabkan hubungan yang terjalin baik dengan Jepang membuat bertambahnya interaksi Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia Timur tidak terkecuali dengan Tiongkok. Hasilnya akan ada kerjasama yang akan dikerjakan nantinya baik secara ekonomi maupun keamanan.
3. Membangun hubungan Jepang dan Tiongkok untuk semakin tersadar bahwa keamanan penting bagi kawasan. Meskipun kedua negara ini telah bekerja sama di banyak hal dalam ekonomi akan tetapi hubungan dalam bidang keamanan belum bisa dikatakan sebagai *partner* melainkan musuh yang sedang bersaing untuk siapa yang menjadi lebih kuat.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya sengketa ini tidak saja pada keamanan kedua negara maupun keamanan kawasan Asia Timur, akan tetapi dampak yang ditimbulkan juga mempengaruhi berbagai bidang kerjasama bilateral yang telah dijalin kedua negara. Pada bidang ekonomi, kedua negara terkuat di Asia Timur ini memiliki kerjasama di bidang ekonomi yang telah terjalin

sejak lama, kerjasama meliputi adanya ekspor impor serta *foreign direct investment* (FDI).

Tahun 2012 setelah adanya privatisasi yang dilakukan pihak Jepang, terjadilah demo besar-besaran yang terjadi di Tiongkok tentang anti-Jepang. Banyak perusahaan Jepang yang membuka perusahaannya di Tiongkok dipaksa untuk menutup usahanya dalam beberapa waktu. Selain itu Tiongkok melarang seluruh produk Jepang untuk diperjualbelikan. Bahkan perusahaan agensi perjalanan di Tiongkok diminta untuk membatalkan seluruh paket perjalanan liburan ke Jepang.²⁶ Dilansir oleh media massa berbahasa Inggris di Tiongkok bernama “China Daily”, kerugian ekonomi lebih banyak ditanggung oleh Jepang daripada Tiongkok. Hal ini disebabkan karena Tiongkok merupakan pasar ekspor terbesar ketiga bagi Jepang setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa.²⁷ Perusahaan Jepang di Tiongkok sebanyak 40% lebih memilih untuk memindahkannya ke negara lain karena hubungan bilateral kedua negara yang tidak stabil. Pada bidang turisme, di bulan yang sama adanya protes tersebut, perusahaan penerbangan asal Jepang membatalkan 23.000 jadwal penerbangan dari Tiongkok ke Jepang.²⁸ Turis Tiongkok yang datang ke Jepang diperkirakan turun sebanyak 70%, sedangkan turis Jepang yang datang ke Tiongkok diperkirakan turun sebanyak 30%.²⁹

²⁶ Justin McCurry, *theguardian.com*, “Japan Firms Close Offices In China as Island Row Escalates”

²⁷ Ferry Wittchen, *diplomatisches-magazin.de*, “The Economic Aspect of the Chinese-Japanese Conflict about the Senkaku-Diaoyu Islands”

²⁸ Ferry Wittchen, *ibid.*

²⁹ John Chan, *wsws.org*, “Economic fallout of Japan-China island dispute widens”

Perusahaan Jepang yang terimbas banyak dengan adanya sengketa kepulauan ini pada saat terjadinya privatisasi tersebut adalah perusahaan pada bidang otomotif. Tercatat Toyota mengalami penurunan penjualan sebesar 48,7% dari penjualan bulan sebelumnya yaitu 44.100 unit mobil. sedangkan Honda memperkirakan mengalami kerugian sebesar 40,5% dari penjualan di bulan sebesar yaitu sebanyak 33.091 unit mobil.³⁰ Keseluruhan kerugian kendaraan berlabel dari Jepang ditaksir mencapai 29% dibandingkan dengan awal tahun menurut *China Association of Automobile Manufactures*.³¹

E. Kesimpulan

Pemikiran tersebut berhasil Abe sampaikan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya terutama pada konflik masalah teritorial dengan Tiongkok terkait Kepulauan Senkaku. Kepulauan Senkaku merupakan kepentingan nasional Jepang yang telah dipertahankan sejak datangnya klaim dari Tiongkok. Konflik ini muncul saat ditemukannya sumber daya tidak dapat diperbaharui seperti gas dan minyak bumi. Pasang surutnya hubungan kedua negara paling kuat di Asia Timur ini pun sebagian besar dipengaruhi oleh adanya sengketa ini. Namun, meskipun konflik ini sudah berlangsung lama, belum juga ditemukan solusi yang dirasa dapat menampung aspirasi dari kedua negara bersangkutan. Abe datang sebagai PM dengan terobosan-terobosan baru, seperti mengubah struktur SDF dan menaikkan anggaran pertahanan Jepang. Bahkan, Abe sempat mengutarakan keinginannya untuk mengamandemen pasal 9 Konstitusi Jepang yang membatasi ruang gerak militer Jepang. Meskipun dalam perjalanannya untuk

³⁰ Knowledge.wharton.upenn.edu, "Rising Tensions the Impact of the China-Japan Territorial Dispute"

³¹ Knowledge.wharton.upenn.edu, *ibid*.

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

mengamandemen pasal tersebut, Abe masih menemui banyak halangan, sehingga hingga sampai saat ini cita-cita tersebut belum terwujud. Dapat dilihat bahwa kepribadian Abe sangat persis dengan kakeknya yang ambisius.

Adanya sengketa Kepulauan Senkaku membawa dampak yang banyak bagi keamanan kawasan maupun hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang yang telah dijalin sejak lama. Adanya sengketa ini menambah daftar panjang kompleksitas keamanan kawasan yang ada di Asia Timur. Apabila menilik sengketa yang terjadi berserta prospek keberlanjutan masalah yang ada, sudah sepantasnya diperlukan pengaturan kawasan demi menncipatakan adanya perdamaian di kawasan Asia Timur. Namun, hingga saat ini negara-negara di Asia Timur belum ada tanda-tanda dalam mengusahakan pengaturan keamanan. Hal ini bisa saja disebabkan karena adanya kekuatan berimbang di negara-negara kawasan Asia Timur, sehingga masing-masing negara mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri yang sulit untuk disatukan. Selain itu dampak yang ditimbulkan adanya sengketa ini adalah pada kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi. Jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ini membawa dampak buruk bagi situasi ekonomi kedua negara dimana terjadi kemrosotan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ministry of Foreign Affairs of Japan, *The Senkaku Islands : Seeking Maritime Peace based of the Rule of Law, Not Force or Coercion*, MOFA Publishing, 2014.

Artikel / Artikel Jurnal

Berkofsky, A, "Japan's Defense and Security Policies : What's Old, What's New, What's Ahead", *Konrad Adenauer Stiftung*, <http://www.kas.de/wf/doc_kas_30190-1532-1-30.pdf?120224044555>

Edström , Bert, "The Success of Successor : Abe Shinzo and Japan's Foreign Policy", *Silk Road Paper 2007*, <http://isdpeu/content/uploads/publications/2007_edstrom_the-success-of-a-successor.pdf>

Miller, J. Berkshire, "Abe's Difficult Road to Constitutional Change in Japan", *Global Asia Vol.11 No.3*, 2016.

Tatsumi, Yuki, "Senkaku Islands/ East China Sea Disputes - A Japanese Perspectives", *CNA Maritime Asia Project*, <https://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/Yuki-CNA_paper_8-2013_1.pdf>

Internet

Chan, John, "Economic fallout of Japan-China island dispute widens", <https://www.wsws.org/en/articles/2012/10/chjp-017.html>, Surakarta.

Jimin, Chen, "Solving The Northeast Asia Security Dilemma", <http://thediplomat.com/2013/05/solving-the-northeast-asia-security-dilemma/>, Surakarta.

Analisis Sikap Pemerintahan Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Senkaku pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua

Knowledge Wharton, "Rising Tensions the Impact of the China-Japan Territorial Dispute", <http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/rising-tensions-the-impact-of-the-china-japan-territorial-dispute/>, Surakarta.

McCurry, Justin, "Japan Firms Close Offices In China as Island Row Escalates", <https://www.theguardian.com/world/2012/sep/17/japanese-firms-close-offices-china>, Surakarta.

MOFA Japan, "National Security Council (NSC)", http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000080.html, Surakarta.

P. Loff, Adam, "Japan's 2010 National Defense Program Guidelines- Reading The Tea leaves", www.eastwestcenter.org/publication, Surakarta.

Reynolds, Isabel, "Japan Defense Budget to Increase for First Time in 11 Years", <https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-01-29/japan-s-defense-spending-to-increase-for-first-time-in-11-years>, Surakarta.

Spitzer, Kirk, "Japan Boosts Defense Spending, More or Less", <http://nation.time.com/2013/01/31/japan-boosts-defense-spending-more-or-less/>, Surakarta.

Xinhua News, "Japan launches US-style National Security Council", http://news.xinhuanet.com/english/world/2013-12/04/c_132941237.htm, Surakarta.

Wittchen, Ferry, "The Economic Aspect of the Chinese-Japanese Conflict about the Senkaku-Diaoyu Islands", <https://www.diplomatisches-magazin.de/business-11-2012-en/A1/>, Surakarta.